

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Penelitian**

Kota Bandung merupakan kota yang dikenal dengan luas wilayahnya terbesar di bagian Barat pulau Jawa dan pusat administratif provinsi tersebut, memiliki sejarah yang kaya. Awalnya dijuluki sebagai "Kota Kembang" karena pesona alamnya yang memikat dan cuaca sejuk yang kerap diselimuti oleh kabut. Namun, dengan berlalunya waktu, Kota Bandung mengalami transformasi menjadi kota yang sering disebut sebagai Paris van Java karena pesatnya perkembangan juga menjadi titik pusat perbelanjaan. Seiring dengan berjalanya waktu, Angka pertumbuhan populasi di Kota Bandung terus meningkat setiap tahun, menjadikannya sebagai kota yang paling padat di Jawa Barat. Meskipun mayoritas penduduknya adalah penduduk asli, namun terdapat juga sejumlah signifikan orang yang berasal dari luar kota. Peningkatan rasio penduduk ini menimbulkan persaingan ekonomi di antara penduduk asli, yang berupaya mengejar peluang ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Warga Bandung yang berusaha mencari peluang mencari nafkah berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang memiliki pendidikan tinggi hingga yang tidak bersekolah sama sekali. Fenomena ini mengakibatkan peningkatan jumlah pegawai kantoran serta pelaku usaha di Kota Bandung, sehingga mempengaruhi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Merupakan individu yang tidak mampu mengikuti persaingan di masyarakat umum, dengan tingkat

keberuntungan yang lebih rendah daripada orang lain. Untuk meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, mereka kesulitan bersaing dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau gaya hidup yang lebih mewah daripada mereka. Banyak orang memilih untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan melakukan aktivitas yang dianggap negatif oleh masyarakat secara umum, seperti mengemis, menjadi pengamen, atau membersihkan kaca mobil pada saat lampu lalu lintas berhenti. Fenomena ini juga berhubungan dengan peningkatan jumlah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di kota Bandung atau sering kita sebut dengan Tunawisma. Tunawisma adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak. Banyak dari mereka memilih untuk mengemis sebagai profesi untuk mencari nafkah.

Pihak Dinas Sosial Kota Bandung menyebutkan bahwa tingkat keberadaan tunawisma meningkat di berbagai daerah Kota Bandung. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, banyak dari mereka mencari nafkah dengan meminta belas kasihan kepada orang lain, yang sering disebut sebagai pengemis. Bahkan, beberapa pengemis terkadang menggunakan taktik menekan untuk mendapatkan simpati. Para penghuni tak memiliki rumah di wilayah Kota Bandung memilih untuk tinggal di tepi jalan, sering kali menggunakan karton bekas sebagai alas tempat tidur. Mereka sering disebut sebagai tunawisma. Tunawisma merujuk kepada individu yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, yaitu tidak mempunyai kehidupan yang bermartabat. Permasalahan tunawisma sendiri merupakan kombinasi dari keduanya, yakni Individu yang berprofesi sebagai pengemis dan gelandangan tidak hanya ditemukan di Kota Bandung, tetapi juga tersebar di

seluruh kota di Indonesia. Mengurangi jumlah tuna wisma di kota Bandung merupakan misi bersama bagi masyarakat khususnya pemerintah kota Bandung.

Pemerintah Kota Metropolitan Bandung juga ikut serta dalam pemberantasan tunawisma, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Gelandangan dan Mengemis (Tunawisma), dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Kota Bandung mengatur mengenai cara menangani dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Dimana Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai fasilitator dalam meminimalisir rasio tunawisma di kota Bandung untuk menanggulangi permasalahan tunawisma di kota Bandung. Dengan jumlah PPKS yang terus melonjak jumlahnya, Dinas Sosial mencatat kenaikan PPKS sebesar 25 persen, Khususnya Tunawisma.

Dinas Sosial Kota Bandung menyatakan bahwa mereka masih memerlukan tenaga kerja yang memadai dan menghadapi kendala anggaran dari pemerintah dalam menjalankan program penanganan sosial. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pihak berwenang dalam menangani para tunawisma yang sering kali muncul di Kota Bandung. Fakta bahwa jumlah tunawisma di kota tersebut meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir tidak bisa diabaikan. Peningkatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh masalah kemiskinan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh gelombang PHK dari perusahaan serta dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Bandung berencana untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait,

termasuk Satpol PP dan pihak kewilayahan di 30 kecamatan, dalam upaya penanganan masalah tunawisma ini, mengingat luasnya wilayah Kota Bandung.

Dinas Sosial Kota Bandung mengaku menghadapi sejumlah kendala dalam pemberantasan tunawisma di Kota Bandung, termasuk dalam pelaksanaan atau penerapan program tersebut. Misalnya saja ketika Dinas Sosial melakukan operasi penyelamatan atau biasa disebut razia, maka diperlukan strategi yang cukup untuk menangkap para tunawisma di Kota Bandung. Selain itu, dinas sosial tidak hanya menangkap para tunawisma, tetapi juga menjalankan program penguatan posisi para tunawisma dalam rangka pemberdayaan bagi penyandang tunawisma.

Dalam menangani permasalahan PPKS, khususnya tunawisma, Dinas Sosial Kota Bandung menyadari bahwa penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, terutama di kota besar seperti Bandung. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012, pendekatan terhadap masalah ini dilakukan melalui tiga cara sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau mencegah agar masalah sosial tidak muncul. diantaranya yaitu :

1. Preventif

Usaha preventif adalah usaha yang dapat dilakukan melalui Langkah-langkah yang meliputi pelatihan, motivasi, penyuluhan, bimbingan sosial, dan pemberdayaan masyarakat

## 2. Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengatasi Penyandang Tunawisma yaitu dengan memberikan fasilitas kepada Penyandang Tunawisma berupa pelatihan softskill serta program pengembangan kreatifitas bagi Penyandang Tunawisma.

## 3. Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk bimbingan dan pelatihan, baik untuk meningkatkan keterampilan fisik maupun mental individu.

Untuk menjalankan ke tiga Program Dinas Sosial tersebut, perlu adanya tahapan pengisian data yang harus dilakukan yaitu melengkapi data untuk pembuatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS merupakan sebuah acuan dalam memberikan bantuan Sosial atau Pemberdayaan. Oleh karena itu sebelum Tunawisma / Gelandangan di Kirim untuk dilakukan Pelatihan, Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Program Pemberdayaan Dinas Sosial Lainnya diharuskan melakukan pengumpulan data yang berupa identitas dari Tunawisma / Gelandangan tersebut untuk menjadi bahan acuan dalam pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Pemberdayaan.

Menghadapi tantangan yang terjadi, peneliti memilih judul penelitian yang berfokus pada **“Implementasi Program Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Bandung dalam Penanggulangan Penyandang Tunawisma”**.

## **B Fokus Penelitian**

Dilatarbelakangi oleh konteks yang telah dijelaskan, penelitian ini menitikberatkan pada Implementasi Program Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Bandung dalam Penanggulangan Penyandang Tunawisma. Adapun pertanyaan penelitian yang dipergunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan dan tujuan Program Preventif dalam Penanggulangan Penyandang Tunawisma di Kota Bandung ?
2. Bagaimana tindakan dan tujuan Program Represif dalam Penanggulangan kasus Penyandang Tunawisma di Kota Bandung ?
3. Bagaimana tindakan dan tujuan Program Rehabilitatif dalam Penanggulangan kasus Penyandang Tunawisma di Kota Bandung ?

## **C Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, antara lain:

1. Untuk Mengetahui bagaimana tindakan dan tujuan Program Preventif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi tunawisma.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan dan tujuan Program Represif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi tunawisma.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan dan tujuan Program Rehabilitatif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi tunawisma.

## **D Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### **D.1 Kegunaan Akademis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang berharga serta memberikan masukan yang berguna bagi peneliti dan pembaca di bidang Pengembangan Masyarakat Islam perihal gambaran tentang manfaat juga pentingnya Program Pemberdayaan dalam Penanggulangan Penyandang Tunawisma, Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini akan mendorong untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap Program Pemberdayaan Masyarakat dan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang pemberdayaan akan mendorong partisipasi aktif dari mereka dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, menuju tercapainya kesejahteraan yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Pengetahuan dan Informasi tambahan juga dapat menjadi bahan referensi bagi Jurusan dan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, Khususnya dalam mengkaji topic topic yang terdapat kaitan dengan Implementasi Program Pemberdayaan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Penyandang Tunawisma.

### **D.2 Kegunaan Praktisi**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pengetahuan yang lebih mendalam dalam memahami masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembanding antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di

lapangan. Bagi pembaca dan Dinas Sosial Kota Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya menuju perbaikan yang lebih baik.

## **E Penelitian Terdahulu**

Bagian ini menguraikan beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan studi yang akan dilakukan, Peneliti sudah mengumpulkan 3 hasil penelitian terdahulu diantaranya :

**Pertama**, Irawaty Achmad (2019), Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Judul "*Kondisi Sosial Penyandang Tunawisma dengan Konsep Pemberdayaan Ekonomi di Makassar*". Penelitian ini menjelaskan tentang konsep pemberdayaan penyandang tunawisma dalam program Dinas Sosial Kota Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat Kota Makassar yang sesuai dengan norma bermasyarakat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk melaksanakan program pemberdayaan dibutuhkan kerja sama antara pihak Dinas Sosial Kota Makassar dengan berbagai pihak lain untuk bekerja sama dalam melakukan pelatihan terhadap Penyandang Tunawisma di Kota Makassar dengan tujuan agar supaya Penyandang Tunawisma memiliki Skill dalam melakukan Pengembangan di Bidang Perkonomianya dengan arah menuju masyarakat yang sejahtera. Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah Fokus terhadap Implementasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung dalam melakukan Program Pemberdayaan bagi Penyandang Tunawisma.

**Kedua**, Hinu Sulistiya (2015), Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, dengan Judul “*Pembinaan Gelandangan dan Tunawisma Dalam Mempersiapkan Kemandirian di Panti Karya Kota Yogyakarta*”. Penelitian ini menggambarkan Program Pembinaan bagi Gelandangan dan Tunawisma yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya pembinaan gelandangan dan tunawisma dalam mencapai kemandirian, yang dilaksanakan di Panti Karya Kota Yogyakarta, serta untuk menguraikan metode pembinaan gelandangan dan tunawisma dalam mempersiapkan kemandirian di Panti Karya Kota Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah para pegawai atau pengelola Panti Karya Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode yang sama yakni Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Adapun perbedaan dengan Penelitian ini yaitu Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yang berbeda.

**Ketiga**, Hafiz Saputra Hasan (2021), Universitas Islam Riau, Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul “*Peranan Dinas Sosial dalam Membina Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandung*”. Penelitian ini menguraikan tentang strategi perencanaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Strategi tersebut mencakup pendataan ulang gelandangan dan pengemis, pelaksanaan tindakan pencegahan, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, bimbingan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Dalam penelitian ini

juga dipaparkan bahwa Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung ialah dengan pengarahan mengenai norma sosial kehidupan, agama dan juga pengarahan untuk tidak hidup secara menggelandang dan melakukan pengemisan serta tidak kembali tinggal dijalanan. Adapun perbedaan dengan Penelitian ini yaitu dalam Subjek dan Lokasi Penelitian yang berbeda.

## **F Landasan Pemikiran**

### **F.1 Landasan Teoritis**

Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada masyarakat dengan harapan akan membuahkan hasil yang diinginkan. Dapat dipahami Pemahaman bahwa implementasi merupakan langkah kunci dalam menjalankan suatu kebijakan menjadi semakin jelas.

Menurut Hannifah Harsono (2002:67), Implementasi adalah proses mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi tindakan dengan tujuan untuk meningkatkan sebuah program. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah Implementasi diartikan sebagai Pelaksanaan atau Penerapan. Istilah ini sering kali terkait dengan proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa istilah implementasi berfokus pada aktivitas atau tindakan konkret yang dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau sistem. Penggunaan kata "mekanisme" menekankan bahwa implementasi bukan sekadar tindakan semata, melainkan proses yang

terorganisir dengan baik dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan standar atau norma yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan dari suatu program atau kegiatan.

## **F.2 Landasan Konseptual**

### **a. Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata "power" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. (Suharto, Edi, 2010:57). Pemberdayaan adalah kemampuan seseorang untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya. Keberdayaan atau kekuatan masyarakat dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berbeda secara konseptual, yaitu:

1. Kepuasan kebutuhan dasar meliputi kebebasan dalam berbagai aspek, tidak hanya sebatas kebebasan berekspresi, tetapi juga kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan penderitaan.
2. Mencari sumber-sumber produktif yang mampu meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia pasca pemberdayaan
3. Turut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi proses tersebut.

Menurut Soetarso dalam (Huraerah 2011:39) Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat memiliki dua makna yang saling terkait, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas, dukungan dan peran seluruh elemen masyarakat supaya menjadi awal mula dukungan berkelanjutan terhadap segala bentuk kesejahteraan sosial.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang telah meningkatkan kapabilitas, motivasi, dan kontribusinya.

Pemberdayaan dalam Islam dapat disebut dengan Dakwah bil-amal, Dakwah lebih menitikkan fokus pada pengorganisasian dan penguatan sumber daya manusia dalam menerapkan ajaran Islam (peran Dakwah), sambil tetap memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya yang berlaku. meletakkan (ma'ruf) dan pembebasan hidup manusia melalui kebaikan dari atas, dari bumi demi kehidupan semua orang yang bermartabat dan normal, Sehingga, upaya tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit sosial. Pemberdayaan yang terkait dengan ilmu dakwah dapat dianggap sebagai dakwah kontemporer yang sangat efektif, karena dalam konsep dakwah ini, tidak hanya berfokus pada dimensi spiritual semata, tetapi juga melibatkan penataan kehidupan yang lebih konkret.

Berangkat dari konsep pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas keterampilan/sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya. Sumber daya kualitas hidup masyarakat terkait dengan penguatan masyarakat di bidang lain. Oleh karena itu, jelas bahwa kualitas hidup seseorang merupakan acuan terpenting dalam menentukan status dan kesejahteraan suatu kelompok sosial. Berikutnya muncul konsep penguatan sumber daya manusia, dengan fokus pada pelayanan dan kemampuan Dinas Sosial Kota Bandung dalam

memberikan layanan dan fasilitas bagi para tunawisma untuk dikembangkan Potensinya.

b. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan badan eksekutif pemerintah daerah yang bergerak di bidang sosial. Dinas Sosial diatur oleh pengelola yang berada di bawah wewenang dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah untuk mengatasi permasalahan sosial di Kota Bandung dengan fokus pada permasalahan sosial seperti pelayanan rehabilitasi, anak, lanjut usia, Individu yang mengalami keterbatasan ekonomi, orang-orang dengan disabilitas, perlindungan serta keamanan sosial, serta penanganan dalam situasi bencana alam maupun bencana sosial, serta pelayanan bagi masyarakat miskin berupa pemberdayaan sosial.

Berdasarkan konsep penanganan pengemis di Kota Bandung, terdapat tiga pendekatan yang menjadi dasar yuridis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980, yaitu :

- a) Preventif
- b) Represif
- c) Rehabilitatif

Program pemberdayaan tersebut merupakan langkah pihak Pemerintah untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya masyarakat yang terjerat pada kondisi permasalahan kesejahteraan sosial.

### c. Penyandang Tunawisma

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penyandang" diartikan sebagai individu yang menderita atau mengalami sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah "homeless" digunakan untuk menyebut seseorang yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap. Mereka sering bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan keadaan yang memungkinkan bagi mereka.

Dalam pengertian lain, Tunawisma adalah individu yang menjalani kehidupan di luar standar kehidupan yang dianggap wajar oleh masyarakat lokal. Mereka tidak memiliki akses terhadap sarana penghidupan atau tempat tinggal tetap, sehingga sering kali berpindah-pindah ke tempat-tempat umum.

Pada hakikatnya penyandang tunawisma adalah individu yang mengalami penyelewengan terhadap norma dalam kehidupan manusia disekitarnya. Mereka menjalani kehidupan yang kurang bermartabat sebagai manusia. Dalam opini masyarakat, tunawisma dipandang sebagai individu yang tidak memiliki penghidupan yang cukup baik dan tempat beristirahat yang normal.

### d. Perubahan Perilaku

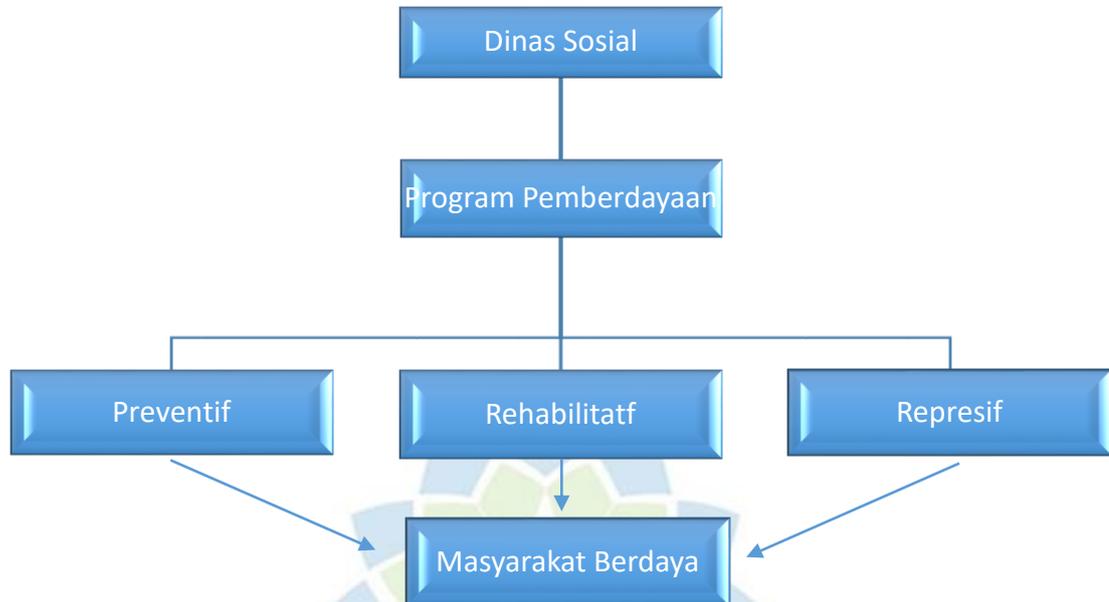
Perilaku adalah konsekuensi dari segala bentuk pengalaman dan hubungan individu dengan lingkungannya. Pengetahuan, sikap dan tindakan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Perilaku manusia didasarkan pada perspektif psikologis dan fisiologis yang holistik. Dari perspektif ini, mencari

pemisahan antara pengaruh dan peranannya dalam evolusi perilaku manusia menjadi tantangan yang sulit (Budiharto, 2013).

Perilaku bisa dipahami dengan lebih logis sebagai respons suatu organisme atau individu terhadap rangsangan yang datang dari luar subjek. Reaksi ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pasif dan aktif, di mana bentuk pasif merupakan respons internal yang dapat diamati secara langsung (Adventus & Mahendra, 2019).

Teori respon organisme terhadap suatu stimulus (SOR). Teori yang diusulkan oleh Hovland pada tahun 1953 bersandar pada prinsip bahwa penyebab perubahan perilaku bergantung pada efektivitas stimulus yang bekerja pada tubuh. Keberhasilan dalam mempengaruhi perubahan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sangat bergantung pada efektivitas sumber komunikasi, seperti kredibilitas pemimpin dan gaya berbicara. (Hovland et al., 1953).

### F.3 Kerangka Konseptual



Tabel 1. 1 Kerangka Konseptual

### G Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, juga dikenal sebagai metodologi penelitian atau prosedur penelitian, mencakup serangkaian tahapan yang diambil dalam suatu penelitian. Berikut adalah langkah-langkah penelitian yang diambil dari penelitian ini:

#### G.1 Lokasi Penelitian

Proses penelitian dilakukan dikantor Lembaga Dinas Sosial Kota Bandung Jl. Babakan Karet, Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Dinas Sosial Kota Bandung sempat menjadi tempat Praktik Profesi bagi peneliti

sehingga menjadikan nilai plus karena tersedianya data yang diperlukan dan pihak Kantor Dinas Sosial Kota Bandung telah mengonfirmasi ketersediaan data dan informasi terkait layanan dan fungsi yang disediakan oleh kantornya. dalam Upaya Simbiosis Mutualisme karena merasa terbantu dengan adanya Peneliti yang ikut serta dalam melakukan pekerjaan sebagai pegawai selama 3 hari di Dinas Sosial Kota Bandung.

## **G.2 Paradigma Penelitian**

Peneliti menggunakan paradigma interpretivisme dilandasi dengan alasan yang kuat karena Paradigma interpretivisme memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam perspektif dan pengalaman individu yang terlibat dalam program pemberdayaan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pemangku kepentingan di Kota Bandung menginterpretasikan program tersebut, bagaimana makna sosial diberikan terhadap program, serta bagaimana konteks lokal dan kebudayaan memengaruhi implementasi dan persepsi terhadap program.

Dengan pendekatan interpretivisme, peneliti dapat melakukan kajian kritis terhadap program, Menilai seberapa efektifnya dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas, dan menyusun rekomendasi yang lebih kontekstual untuk perbaikan atau penyesuaian program. Dengan demikian, paradigma interpretivisme akan memberikan landasan teoritis dan metodologis yang kuat untuk mengeksplorasi implementasi program pemberdayaan Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanggulangan

tunawisma, serta memahami kompleksitas permasalahan sosial dan budaya lokal yang memengaruhinya.

### **G.3 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menggambarkan permasalahan dan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan strategi dalam penelitian sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif berupa teks dan visual. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, meliputi teks dan visual, bukanlah data numerik. Pendekatan penelitian kualitatif tidak tergantung pada analisis statistik, melainkan bergantung pada bukti-bukti deskriptif. Sebuah artikel lain mengindikasikan bahwa pendekatan kualitatif bersandar pada realitas di lapangan dan pengalaman partisipan, kemudian mencari dasar teoritisnya pada tahap akhir.

Metode penelitian kualitatif melibatkan pendekatan evaluasi yang menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis, serta perilaku yang diamati. Dalam proses ini, peneliti bertugas untuk menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan untuk meraih pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci terhadap persoalan yang diteliti.

#### **G.4 Jenis dan Sumber Data**

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif, diperoleh melalui observasi, pencatatan, dan analisis. Jenis data dalam penelitian ini meliputi bagaimana tindakan dan tujuan berdasarkan tiga program pemberdayaan Dinas Sosial Kota Bandung dalam melakukan penanggulangan penyandang tunawisma.

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data tentang tindakan dan tujuan Program Preventif, Rehabilitatif dan Represif di Dinas Sosial Kota Bandung yang didapat langsung dari Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial. Sedangkan sebagai sumber data sekundernya adalah karyawan Dinas Sosial Kota Bandung (Pelaksana), Masyarakat dan penyandang tunawisma.

#### **G.5 Informan atau Unit Analisis**

Partisipan dalam studi ini mencakup Lembaga Dinas Sosial Kota Bandung dan mereka yang menjadi sasaran program pemberdayaan yang diadakan oleh instansi tersebut, yakni para tunawisma.

#### **G.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang ingin dibahas adalah teknik observasi langsung dan wawancara mendalam.

### **1. Teknik Observasi**

Pengamatan ini dilakukan secara langsung di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung. Langkah-langkah tersebut diambil agar peneliti dapat menggali data yang akurat mengenai tindakan dan tujuan dari tiga Program Pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanggulangan penyandang tunawisma.

### **2. Teknik Wawancara**

Wawancara dilakukan langsung dengan Pasien Rumah Singgah, Karyawan (Pelaksana) dan kepala bagian Bidang Rehabilitasi Sosial yang berwenang dan menguasai pemahaman tentang program pemberdayaan yang meliputi Preventif, Rehabilitatif dan Represif. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, di mana peneliti menyusun instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden mengenai tindakan dan tujuan program Preventif, Rehabilitatif dan Represif dalam menanggulangi tunawisma.

## **G.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian, yang melibatkan pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya. Tujuannya adalah agar data mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain (Emzir, 2010). Dalam proses analisis data, peneliti mengadopsi pendekatan analisis data kualitatif. Pendekatan ini melibatkan tahapan-tahapan seperti bekerja dengan data, mengelompokkan

data, menyusun data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mengidentifikasi pola, menentukan signifikansi, mengekstrak pembelajaran, dan menentukan informasi yang relevan untuk dibagikan kepada orang lain.

Referensi yang dikutip oleh Emzir (1992:16) dalam karyanya tentang Metodologi Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa ada tiga tahapan analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Milles dan Huberman. Tahapan-tahapan tersebut termasuk:

a. *Data Reduction*

Tahapan awal ini merupakan proses pengamatan langsung terhadap kejadian di lapangan, dengan mengumpulkan data secara sistematis, menyoroti elemen-elemen inti, menekankan pada aspek yang krusial, mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta mengeliminasi data yang tidak relevan.

b. *Data Display*

Presentasi data dilakukan melalui narasi singkat, diagram, serta pemetaan relasi antar kategori yang relevan. Selain itu, pengelompokan data disusun secara klasifikasi untuk mencocokkan dengan konteks permasalahan yang sedang diselidiki.

c. *Conclusion / verification*

Dalam tahap menarik kesimpulan dan verifikasi, peneliti berupaya merumuskan kesimpulan dari data yang terkumpul. Seiring dengan bertambahnya jumlah data, kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih spesifik dan terperinci

